

BAB 4

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa definisi femisida sendiri dalam penelitian ini sebagai upaya pembunuhan atas nama gender yang disebabkan oleh rasa ketidaksukaan terhadap perempuan atau dinamakan sebagai *misogyny* dimana kekerasan hingga pembunuhan tersebut dilakukan oleh laki-laki karena dia perempuan. Sebagian besar kekerasan berbasis gender terjadi sebagai akibat dari budaya patriarki yang diciptakan oleh ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi kesenjangan sosial. Femisida yang terjadi di Turki sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau pun mantan pasangan dengan karakteristik yang dominan atau disebut dengan istilah *Less Power* atau *Fewer Resources than their Partner* sehingga berujung pada kematian. Istilah tersebut disebabkan oleh perasaan cemburu, posesif, dan keterikatan yang ekstrim atau perasaan obsesi yang memotivasi para pelaku femisida dimana banyak perempuan mengalami kekerasan yang diawali dengan kekerasan emosional, fisik, seksual hingga diskriminasi oleh pasangan intim atau *Intimate Partner Violence (IPV)* sehingga menyebabkan kematian terhadap perempuan di Turki.

Turki menjadi salah satu negara di Eropa Timur yang memiliki catatan terburuk dalam hal pembunuhan terhadap kaum perempuan terlihat dari protes *Las Tesis* yang dimulai di Chili untuk memprotes kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di banyak tempat di Turki termasuk Majelis Nasional Agung Turki di pusat kota hingga Pegunungan Kaz. Protes yang dilakukan para aktivis dan perempuan di Turki menanggapi serangan tersebut baik di jalanan maupun media sosial dengan menggunakan tagar *#StopMurderersNotWomen*. Protes *Las Tesis* merupakan salah satu protes terbesar yang terjadi di Turki pada tahun 2019 dengan keseluruhan kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap perempuan menyentuh angka 474 kasus dengan jumlah 134 perempuan dibunuh oleh pasangannya sendiri dan 292 dibunuh di rumah sendiri.

Meskipun demikian, Turki telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menekan angka kasus femisida yang terjadi dan melindungi hak-hak perempuan serta pemberdayaan perempuan sehingga kesetaraan gender di Turki mulai terlihat perubahannya. Kemajuan tersebut berupa peratifikasian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta pembaharuan dan penguatan undang-undang nasional untuk melindungi hak atas hidup terhadap perempuan yaitu UU No. 6284 mengenai Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Pembaharuan dan penguatan tersebut memuat mengenai regulasi ruang lingkup bagi korban kekerasan, pencegahan tindakan, pemberian perintah perlindungan bagi korban, pembentukan koordinasi penanganan kasus, hingga bantuan dana sementara kepada korban tindakan femisida.

Sebagai organisasi internasional di bawah komando PBB, UN Women di Turki telah memenuhi peran organisasi internasional dengan mencapai kepentingan Turki dalam menekan angka kasus femisida yang terjadi terhadap perempuan di Turki pada rentan waktu 2017 hingga 2021. UN Women secara signifikan menjalankan tiga peran organisasi internasional seperti yang disebutkan oleh Clive Archer, yaitu peran sebagai instrumen, arena maupun aktor independen. Peran instrumen yang dilakukan UN Women di Turki berupa mempropagandakan sebuah program evaluasi dengan tujuan menghapuskan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan atau femisida di Balkan Barat (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Republik Makedonia Utara, Serbia) dan Turki. Peran arena UN Women di Turki dengan menjadi fasilitator berupa penyelenggara Evaluasi Program Regional UN Women yang disebut Program Tiga Tahun *Implementing Norms, Changing Minds* di Istanbul, Turki pada Februari 2017 - Januari 2020 serta Forum Regional Ketiga yaitu *Integrated Policies, Inclusive Partnerships* di Istanbul, Turki pada 1 - 2 Desember 2021, kemudian UN Women menjadi inisiator dalam Forum Orange the World yang merupakan inisiasi kampanye digital yang bekerja sama dengan semua mitra UNiTE, termasuk badan-badan PBB, Koalisi Aksi Forum Kesetaraan Generasi, Organisasi Masyarakat Sipil hingga sektor swasta yang berfokus pada dukungan terhadap organisasi feminis dan memperkuat gerakan feminis untuk

mengurangi isu femisida di Turki. UN Women juga menjalankan peran sebagai aktor independen dengan membuat keputusan berupa inisiatif *UNiTE to End Violence Against Women Campaign* yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang merupakan upaya bertahun-tahun dalam mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dengan didukung oleh kepemimpinan Sekretaris Jenderal PBB. Selain itu, negara-negara di Amerika Latin, Karibia serta Balkan Barat juga ikut serta bertindak dalam mencapai kesetaraan gender dengan melakukan kerja sama dan bergabung dalam program gabungan bersama Turki dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan seperti program *United Nations Joint Programme on Prevention of Child, Early and Forced Marriage (CEFM)* bersama UNICEF, IOM, UNFPA dan UNHCR dengan mendapat dukungan dari *Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)* atau Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia.

Turki dinilai berhasil dalam menekan angka kasus femisida dibantu oleh UN Women dalam kurun waktu tahun 2017-2021, meskipun demikian keputusan bahwa keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul pada 2021 menyebabkan kenaikan jumlah kasus yang cukup signifikan di tahun-tahun berikutnya dikarenakan lemahnya kondisi institusional dan kesetaraan gender yang telah membudaya di Turki. Meskipun demikian, Menteri Keluarga, Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial Zehra Zumruth Selcuk mengatakan bahwa sistem peradilan dan peraturan internal dinilai cukup dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender atau yang berujung pada tindakan femisida di Turki.

